

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI  
TUA (JHT) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FERDY SYAHPUTRA  
198510058**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)  
OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA	:	Ferdy Syahputra
NPM	:	198510058
JUDUL	:	Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kota medan

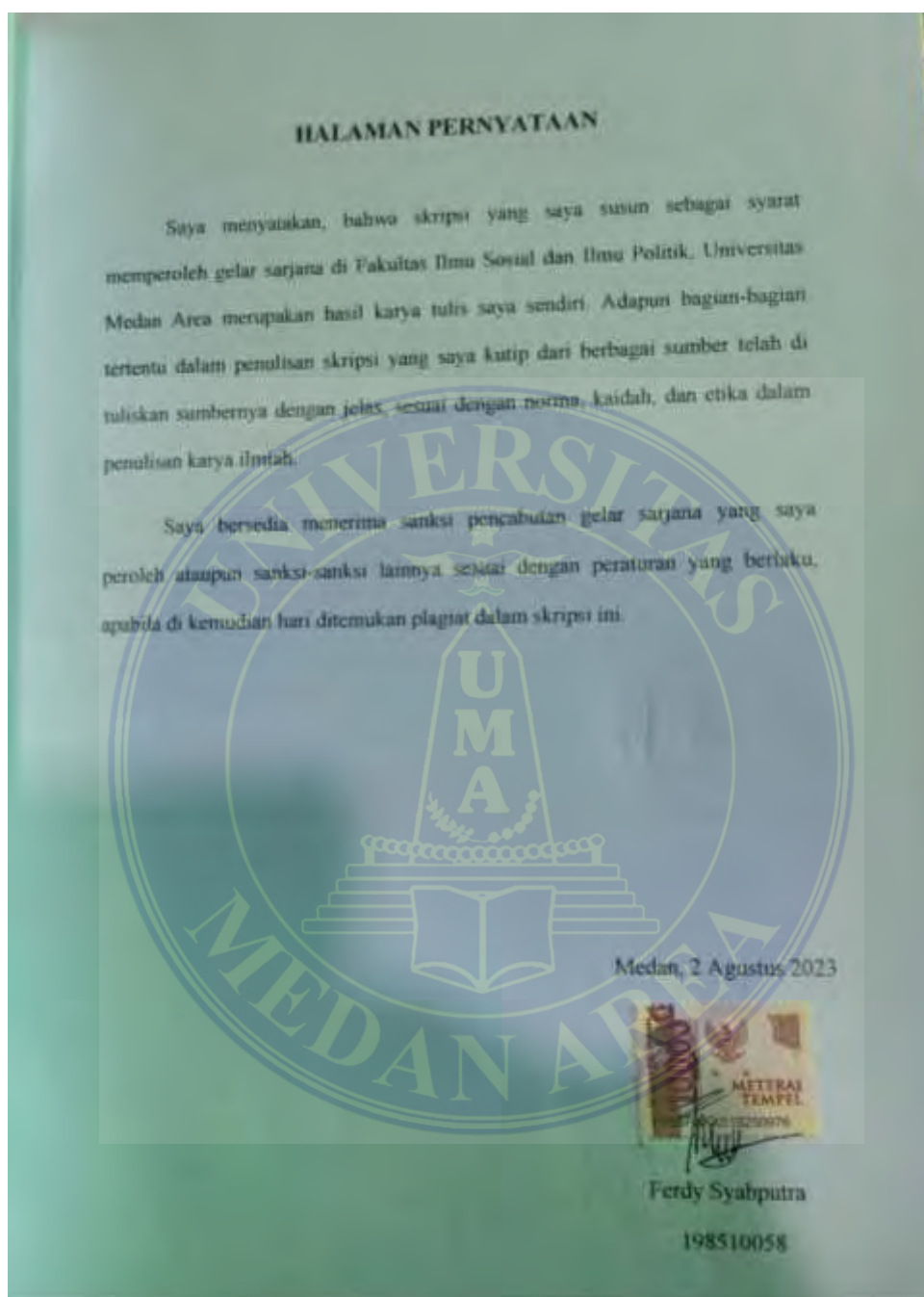
Disetujui oleh,

Pembimbing 1	Pembimbing 2
	
Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.I.P	Marlina Deliana, S.AB, M.AB
Tgl.....	Tgl.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Program Studi
	
Dr. Efflati Julianna Hasibuan, M.Si	Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si
Tanggal .....	Tanggal .....









## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Medan”. Program Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan Hari Tua adalah sebuah program jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktivitas peserta sudah menurun. Namun pada Tahun 2021 masih terlihat minimnya tingkat kepesertaan pada wilayah Sumbagut terlebih pada sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*). Dalam penelitian ini menggunakan Teori Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi bahwa penerapan kebijakan Program Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Medan dengan hasil sudah berjalan dan masih beproses meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari dua indikator implementasi kebijakan yang belum terpenuhi.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial, Program Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan.

## **ABSTRACT**

### ***POLICY IMPLEMENTATION OF THE ESTABLISHMENT GUARANTEE PROGRAMME BY THE SOCIAL SECURITY PROVIDER AGENCY FOR EMPLOYMENT IN MEDAN CITY***

*This thesis is entitled "Implementation of the Old Age Security Programme Policy by the Medan City Employment Social Security Administration Agency. the Social Security Program is also a form of social protection to ensure that all people can fulfill their basic needs and have a decent job. Old Age Security is a social security program that provides protection to participants against the risks that occur in old age. However, in 2021 there is still a minimal level of participation in the North Sumatra region, especially in the informal sector. In this study using Edward III Theory with four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure that the implementation of the Old Age Security Program policy by the Employment Social Security Administration Agency (BPJS) in Medan City has been running and is still in process although not optimal, this is can be seen from the two indicators of policy implementation that have not been fulfilled*

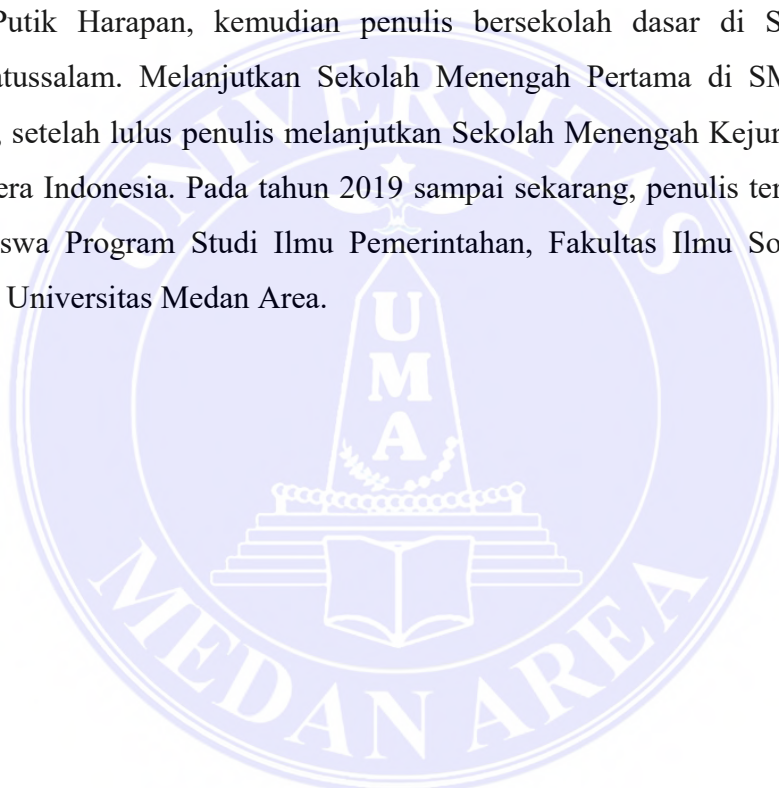
***Keywords: Social Security, Old Age Security Program, Employment BPJS.***



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama FERDY SYAHPUTRA, lahir di Medan Sumatera Utara pada tanggal 23 Agustus 1999, Putra dari Bapak Eddy Sahrurn dan Ibu T. Ade Andria Ningsih. Tempat tinggal penulis sekarang di Jln. Gambir Psr VIII Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Riwayat Pendidikan formal penulis menggali dari Taman Kanak-kanak (TK) Putik Harapan, kemudian penulis bersekolah dasar di Sekolah Dasar Madinatussalam. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP An-Nizam Medan, setelah lulus penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Samudera Indonesia. Pada tahun 2019 sampai sekarang, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.



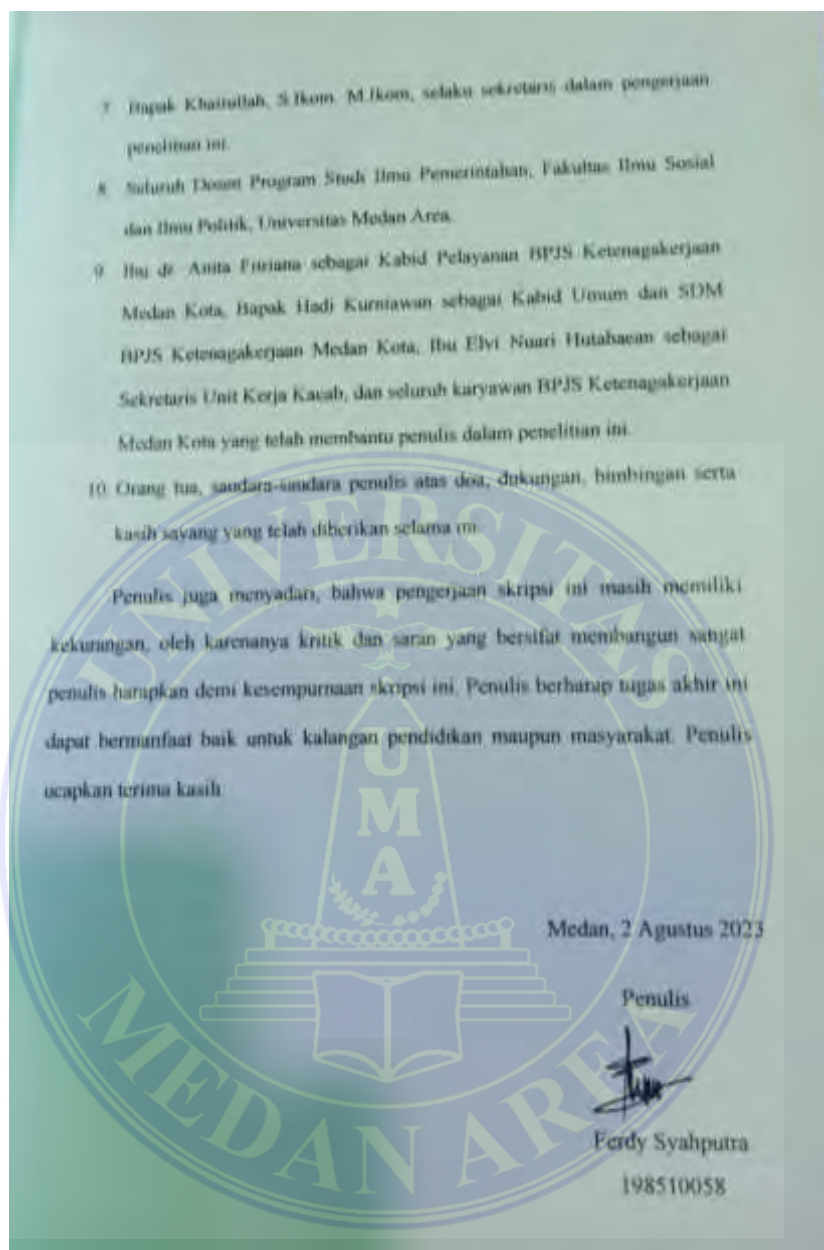


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga penelitian ini terselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini, “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Medan”.

Penulis menyadari, bahwa pada pengerjaan penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral dan maupun material. Maka dari ini, kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

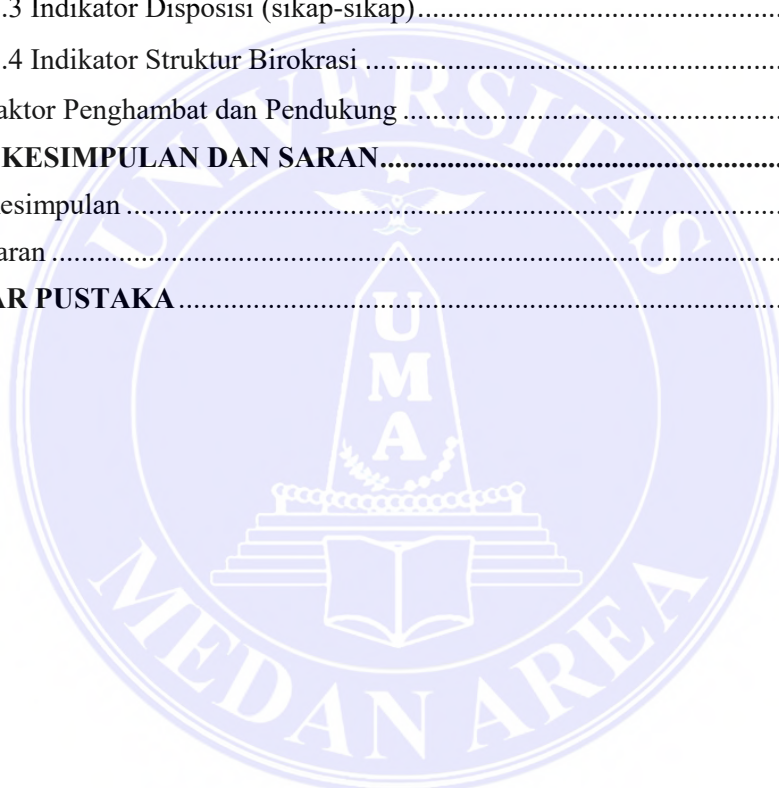
1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MAB selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Jullana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos. M.IP selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan penelitian ini.
6. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan penelitian ini.



## DAFTAR ISI

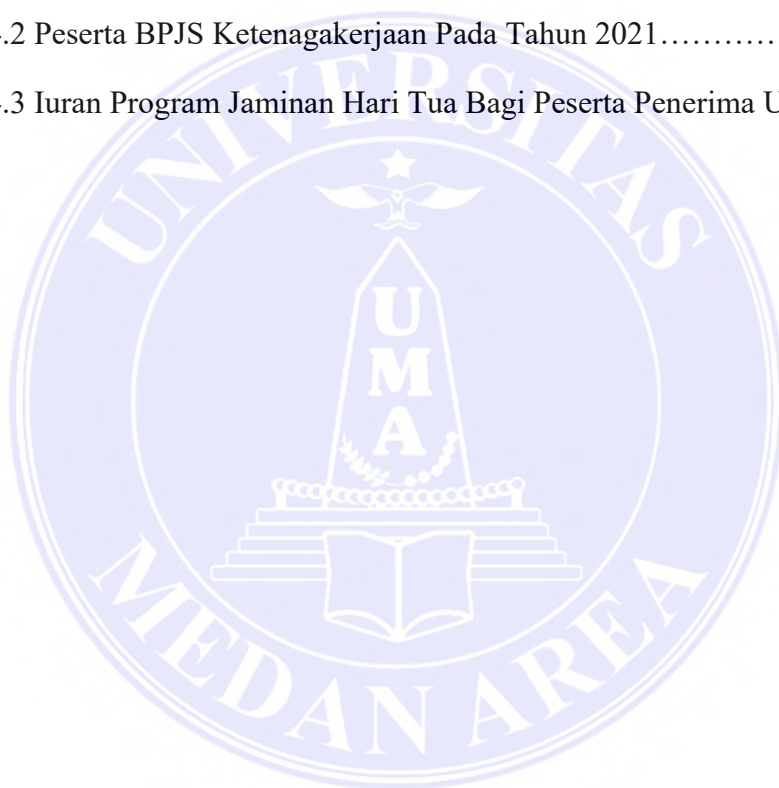
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>ABSTRACT</b> .....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	9
2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.....	12
2.3 Program Jaminan Hari tua (JHT).....	14
2.3.1 Kepesertaan Program Jaminan Hari Tua.....	14
2.3.2 Besar Iuran dan Tata Cara Pembayaran.....	17
2.4 Partisipasi Masyarakat.....	20
2.4.1 Bentuk Partisipasi.....	24
2.4.2 Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat.....	26
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Kerangka Berpikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Sumber Data.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
3.5 Teknik Penentuan Informan.....	36
3.6 Instrumen Penelitian.....	38
3.7 Lokasi Penelitian.....	38

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota .....	40
4.1.2 Visi dan Misi.....	44
4.1.3 Stuktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota.....	45
4.2 Hasil Penelitian .....	50
4.3 Pembahasan Penelitian Terhadap Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh BPJS Ketenagakerjaan Di Kota medan .....	52
4.3.1 Indikator Komunikasi.....	52
4.3.2 Indikator Sumber Daya .....	56
4.3.3 Indikator Disposisi (sikap-sikap).....	59
4.3.4 Indikator Struktur Birokrasi .....	62
4.4 Faktor Penghambat dan Pendukung .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Iuran Program JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.....	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3.2 Rincian Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Daftar Nama Informan.....	50
Tabel 4.2 Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Tahun 2021.....	51
Tabel 4.3 Iuran Program Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah...	52





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	31
Gambar 4.1 Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota.....	41
Gambar 4.2 Logo BPJS Ketenagakerjaan.....	43
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota.....	45
Gambar 4.4 Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan.....	56
Gambar 4.5 Fasilitas Sarpras BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota.....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI.....	71
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA.....	72
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN.....	79
LAMPIRAN 4 SURAT RISET LAPANGAN.....	81
LAMPIRAN 5 SURAT PERSETUJUAN PENGAMBILAN DATA/RISET.....	82
LAMPIRAN 6 SURAT SELESAI PENGAMBILAN DATA/RISET.....	83



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berlandaskan pada Undang-Undang No.40 tahun 2004, menyebutkan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menanggulangi risiko kehidupan masyarakat adalah program jaminan sosial.

Program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara kepada masyarakatnya yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Selain itu, Program Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien, asas keadilan merupakan asas yang bersifat

ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup 3 poin, yaitu bahwa:

- a. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur.
- b. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berlanjut pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan nasional perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana disebutkan juga pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan merubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menambah jenis program jaminan sosial menjadi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan Hari Tua
- c. Jaminan Pensiun
- d. Jaminan Kematian, dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan memiliki cita-cita untuk menciptakan Kota Medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan langkah pertama mewujudkannya yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial maka ditunjuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyelenggaranya.



Berdasarkan data yang disampaikan pihak BPJamsostek wilayah Sumbagut pada tahun 2021, sebanyak 769.403 orang atau 26,87% dari 2,863 juta pekerja formal telah menjadi peserta. Sedangkan dari pekerja informal, 115.565 orang menjadi peserta BPJamsostek atau sekitar 3,35% dari 3,448 juta orang di Sumut.

Salah satu bentuk program perlindungan sosial adalah Jaminan Hari Tua atau yang lebih sering disingkat dengan JHT, yaitu merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional, berdasarkan pada prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total/tetap, atau meninggal dunia. Manfaat Jaminan Hari Tua berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pemerintah bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan rasa kepercayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program sudah dicanangkan pemerintah (Rukminto, 2001:206). Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program tersebut.

Pemerintah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan *monitoring proyek*, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang direncanakan. Semakin baik tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para *stakeholders* (Mikkelsen 1999). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka partisipasi masyarakat pada program Jaminan Hari Tua (JHT) sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan tujuan negara untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

George Edwards III dalam pandangannya menyatakan, bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi

upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat, kemudian proses implementasi kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Alasan penulis mengadakan pengamatan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Medan Kota untuk melihat Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Medan berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak BPJamsostek wilayah Sumbagut pada tahun 2021.

Untuk itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kota Medan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta dalam Program Jaminan Hari Tua di Kota Medan.
2. Belum meratanya sosialisasi program Jaminan Hari Tua di Kota Medan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Supaya penelitian ini mencapai sasarannya, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti. Dengan melihat begitu luasnya ruang lingkup masalah yang teridentifikasi, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Lembaga negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini adalah segala hal yang mengarah kepada penghambat atau kendala dan faktor pendorong yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga negara tersebut.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Medan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Medan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Medan.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

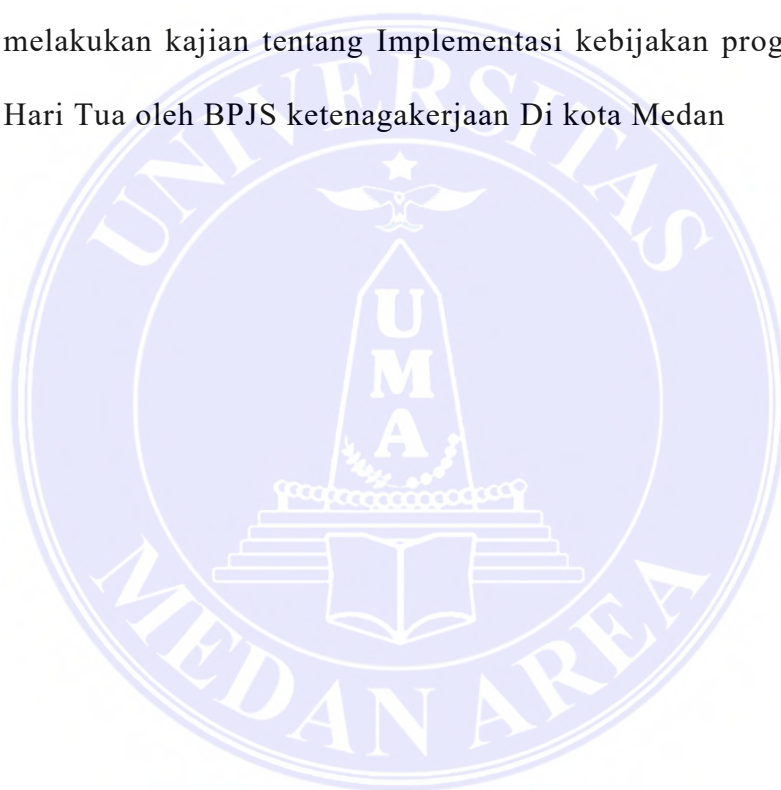
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran nyata bagaimana implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan Di Kota Medan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan sumbangan pikiran bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan program Jaminan Hari Tua di Kota Medan.

## 3. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan berguna juga menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang Implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh BPJS ketenagakerjaan Di kota Medan





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Menurut Syauckani dkk dalam (Suyahman 2021:125) implementasi yaitu pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang di harapkan. Berkaitan dengan berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari proses atau pun rencana yang disusun dengan matang, berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh pemerintah atau institusi.

Menurut Anderson dalam (Karmanis & karjono 2020:6) pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Implementasi kebijakan pada dasarnya yaitu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat dua pilihan langkah, yaitu mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Menurut grindle (Karmanis & Karjono 2020:5) bahwasanya implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti

pada tingkat program tertentu. Menurut (Karmanis & Karjono 2020:6) Implementasi kebijakan pada intinya adalah suatu cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III. Menurut George Edward III (Winarno, 2012:177) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variable-variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi (*communication*) Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dapat dikomunikasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dimana agar komunikasi menjadi efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan menyalurkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pada orang yang tepat sehingga komunikasi menjadi akurat.

b. Sumber daya

Sumberdaya (*resources*) Sumber daya tersebut berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya ini merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Karena walaupun kebijakan sudah dapat dikomunikasikan dengan baik, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak dapat berjalan secara efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal diatas kertas saja, dan tidak ada yang mengimplementasikannya.

### c. disposisi

Disposisi atau sikap-sikap (*dispositions*) Implementor yang memiliki disposisi yang baik adalah implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dan apabila yang terjadi adalah yang sebaliknya yaitu ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Disposisi (sikap) yang menghambat implementasi antara lain:

Pertama Pejabat yang bertanggung jawab tidak tertarik untuk menerapkan hukum yang seharusnya berlaku. Kedua terkadang para pelaksana bersikap selektif terhadap instruksi yang mereka terima dan kadang-kadang menolak instruksi yang tidak sama dengan sikap atau pandangan mereka akan kebaikan tertentu tersebut. Ketiga perbedaan pandangan organisasi juga merintangai kerjasama diantara badan-badan/organisasi yang seharusnya bekerjasama melaksanakan kebijakan. Keempat unit-unit birokrasi biasanya menekankan program-program baru yang mereka anggap akan memperkuat atau mengembangkan aspek-aspek penting misi kebijakan mereka. Kelima unit-unit birokrasi yang menentang usaha-usaha pihak lain yang mengambil atau bersama-sama memakai sumber-sumber (*resources*) yang penting untuk melaksanakan tugasnya. Keenam sikap pejabat yang seharusnya mendapat keuntungan dari implementasi suatu kebijakan yang menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan tersebut.

### d. Struktur birokrasi

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program

program yang kemudian diturunkan menjadi proyek proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

## 2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia dan juga salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945. Di sisi lain, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual. Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk Program Jaminan Tenaga Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan, maka dibentuk lah badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN) dijelaskan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang. Mengacu kepada ketentuan ini, untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional, dibutuhkan “Badan Penyelenggara” yang pembentukannya harus dibuat dalam suatu undang undang. Jangka waktu untuk pembentukan badan penyelenggara yang dimaksud paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya UUSJN. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UUBPJS).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu program yang bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS merupakan Lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial. Sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2004, BPJS merupakan badan hukum nirlaba, Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dijelaskan ada 2 (dua) jenis BPJS. Tepatnya dalam Pasal 5 ayat (2) dikemukakan, BPJS yang dibentuk berdasar undang-undang ini, yaitu: (a) BPJS Kesehatan; (b) BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: (a) jaminan kecelakaan kerja (b) jaminan hari tua (c) jaminan pensiun dan (d) jaminan kematian.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah Lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia di antaranya yaitu: Lembaga asuransi jaminan Kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan Lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS



Kesehatan, Selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

### **2.3 Program Jaminan Hari tua (JHT)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Hari Tua adalah umur pada saat produktifitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda (Lalu husni 2012).

Merujuk Pasal 35 ayat (2) UU SJSN Jaminan Hari Tua adalah program yang ditujukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial atau Tabungan Wajib. Penyelenggaraan jaminan hari tua secara nasional mencakup seluruh penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Jaminan Hari Tua sebagai program jaminan yang memberikan perlindungan kepada peserta terhadap resiko yang terjadi di hari tua, dimana produktifitas peserta sudah menurun. Jaminan Hari Tua merupakan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

#### **2.3.1 Kepesertaan Program Jaminan Hari Tua**

Berdasarkan Pasal 4 PP 46/2015, peserta program JHT terdiri atas peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Kepesertaan terdiri dari Penerima Upah (formal) dan Bukan Penerima Upah (informal). Kepesertaan juga diwajibkan untuk pekerja alih daya (*outsourcing*) dan pekerja kontrak, Perusahaan

yang mempekerjakan karyawannya secara lepas (*Outsourcing*) tetap wajib mendaftarkan karyawannya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik.

### 1. Penerima Upah

Cara Pendaftaran Bagi Penerima Upah Didaftarkan melalui perusahaan. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya akan dikenakan sanksi administrasi bila tidak mengikuti program jaminan sosial berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik karena kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib. Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan: Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja, KTP dan KK. Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan. Apabila pekerja pindah perusahaan maka pekerja diwajibkan meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaannya yang lama ke perusahaan yang baru. Apabila terjadi perubahan data maka perusahaan wajib menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari sejak terjadinya perubahan. Hal ini sesuai dengan prinsip BPJS “Portabilitas” yaitu prinsip

memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi:

### a. Pemilik perusahaan,

Pemilik Perusahaan yang masuk kedalam peserta bukan penerima upah adalah orang-perseorangan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya, dan pemilik perusahaan tersebut tidak menerima upah atau gaji dari usaha yang dikelolanya tersebut. Contoh: Pemilik suatu perusahaan dan yang bersangkutan tidak mengelola secara aktif usahanya (tidak menduduki jabatan struktural/Direktur/CEO).

### b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri,

Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri adalah pekerja yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut (pada umumnya mereka yang bekerja pada sektor informal). Contoh: Pengacara, Dokter Praktek, Perancang Busana, Penyanyi, Pedagang Kaki Lima (PKL), Tukang Ojek, Petani, Nelayan, Tukang Jahit, Kuli Panggul di Pasar, Pengrajin, Pelukis, Satpam Perumahan, dll.

### c. Pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan menerima gaji atau upah.

Bagi pekerja yang Bukan Penerima Upah (BPU) dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara bertahap dengan memilih program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Pekerja yang Bukan Penerima Upah (BPU) dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/keompok/Mitra/*Payment Point* (*Aggregator*/Perbankan) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas. Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan.

### **2.3.2 Besar Iuran dan Tata Cara Pembayaran**

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besar iuran ialah 5,7% dari upah yang berasal 2% dari pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja. Upah yang dijadikan dasar adalah upah sebulan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Cara pembayaran Dibayarkan oleh perusahaan Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan. Pihak penyelenggara jaminan sosial akan memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo Jaminan Hari Tua beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pembayaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah dapat dilakukan oleh peserta sendiri atau melalui Wadah/ Mitra/ *Payment Point/Aggregator/* Perbankan). selama bulanan/ 3 bulan/ 6 bulan/ 1 tahun sekaligus. Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Besar iuran untuk Jaminan

Kematian Rp6.800, Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 1% dan Jaminan Hari Tua 2% sesuai kemampuan penghasilan.

**TABEL IURAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA BAGI  
PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH**

**Tabel 2.1**

<b>Penghasilan</b>	<b>Dasar Upah Untuk Iuran JHT</b>	<b>Iuran JHT</b>
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	20.000
1.100.000 – 1.299.000	1.200.000	24.000
1.300.000 – 1.499.000	1.400.000	28.000
1.500.000 – 1.699.000	1.600.000	32.000
1.700.000 – 1.899.000	1.800.000	36.000
1.900.000 – 2.099.000	2.000.000	40.000
2.100.000 – 2.299.000	2.200.000	44.000
2.300.000 – 2.499.000	2.400.000	48.000
2.500.000 – 2.699.000	2.600.000	52.000
2.700.000 – 3.199.000	2.950.000	59.000
3.200.000 – 3.699.000	3.450.000	69.000
3.700.000 – 4.199.000	3.950.000	79.000
4.200.000 – 4.699.000	4.450.000	89.000
4.700.000 – 5.199.000	4.950.000	99.000
5.200.000 – 5.699.000	5.450.000	109.000



<b>Penghasilan</b>	<b>Dasar Upah Untuk Iuran JHT</b>	<b>Iuran JHT</b>
5.700.000 – 6.199.000	5.950.000	119.000
6.200.000 – 6.699.000	6.450.000	129.000
6.700.000 – 7.199.000	6.950.000	139.000
7.200.000 – 7.699.000	7.450.000	149.000
7.700.000 – 8.199.000	7.950.000	159.000
8.200.000 – 9.199.000	8.700.000	174.000
9.200.000 – 10.199.000	9.700.000	194.000
10.200.000 – 11.199.000	10.700.000	214.000
11.200.000 – 12.199.000	11.700.000	234.000
12.200.000 – 13.199.000	12.700.000	254.000
13.200.000 – 14.199.000	13.700.000	274.000
14.200.000 – 15.199.000	14.700.000	294.000
15.200.000 – 16.199.000	15.700.000	314.000
16.200.000 – 17.199.000	16.700.000	334.000
17.200.000 – 18.199.000	17.700.000	354.000
18.200.000 – 19.199.000	18.700.000	374.000
19.200.000 – 20.199.000	19.700.000	394.000
20.200.000 dan seterusnya	20.700.000	414.000

Sumber: PP RI No.46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

Hari Tua

## 2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation* ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, *TO Participate* adalah kata kerja, ikut mengambil bagian. *Participation* adalah hal mengambil bagian". (Wojowasito W.J.S. Poerwadarminto: 243). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam partisipasi itu terkandung adanya keterlibatan diri dari seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan. Pernyataan ini kemudian didukung oleh definisi yang dikemukakan oleh The Liang Gie bahwa: *Participation* adalah peserta, setiap orang yang turut serta dalam suatu kegiatan, *participation* adalah pengikutsertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan persamaan serta dalam kegiatan organisasi, turut serta dalam organisasi (The Liang Gie:103). Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM PPK, 2007). Menurut Verhagen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang

(individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan.

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan *Society* (Latin) *Society* yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan sebagai berikut: “Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan” (Ibid.:29). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 2009: 116). Menurut Sembiring W.M. (2014) masyarakat adalah kelompok orang-orang yang berinteraksi dan terorganisasi sebagai ciri berbagai kegiatan dalam kelompok dan bertumpu pada tujuan bersama , menurut Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau society merupakan manusia

sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Berkaitan dengan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat juga merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Arnstein (1969) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, penentraman, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol warga negara. Menurut Marisa B. Guaraldo Chougil tangga partisipasi masyarakat di negara-negara yang kurang berkembang (*underdeveloped*), dapat dibagi menjadi 8 tingkatan yaitu: pemberdayaan (*empowerment*), kemitraan (*partnership*), mendamaikan (*conciliation*) dissimulasi/pura-pura (*dissimulation*), diplomasi (*diplomation*), Memberikan informasi (*informing*), konspirasi (*conspiration*), manajemen diri sendiri (*selfmanagement*).

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya sebuah program serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai suatu



proyek atau program jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam membangun masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis program yang akan dilaksanakan.

#### **2.4.1 Bentuk Partisipasi**

Macam bentuk partisipasi, yang bergantung kepada situasi dan keadaan keperluan partisipasi tersebut. Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1998) bentuk partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi dalam bentuk jasa.
- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang.
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berasal dari luar lingkungan tertentu (dermawan/pihak ketiga).
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas, rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi masa.
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
- h. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonomi.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta dari berbagai kalangan disekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan. Proses peran Serta atau Partisipasi menggambarkan keterlibatan personal dalam bentuk: (1) proses pengambilan keputusan; (2) menentukan kebutuhan yang diinginkan; dan (3) menunjukan dan mewujudkan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai, (Sastropetro 1998).

Mengenai bentuk dan tahap partisipasi dapat dicermati dari sebagai pendapat sebagai mana dirangkum Ndraha (1990) berikut ini: (1) partisipasi dalam/melalui kontak yang lain (*contact change*) sebagai salah satu bentuk titik awal perubahan. (2) partisipasi dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya. (3) partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termaksud dalam pengambilan keputusan/penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka, partisipasi yang bersifat teknis/desainproyek. (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, (5) partisipasi dalam penerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang disebut "*participation in benefites*". (6) partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatkan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

rencana dan sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai bentuk, jenis dan model-model partisipasi seperti disebutkan diatas dapat diimplementasikan apabila implementor (*public actors dan social actors*) memperhatikan secara sungguh-sungguh intensif-intensif materil sekaligus moral yang dapat dipetik sebagai buah dari partisipasi yang mereka berikan. Dalam konteks ini faktor-faktor yang sangat berpengaruh baik secara psikologis maupun kultural terhadap kualitas partisipasi yang berpengaruh secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas, maka bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima, mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

#### **2.4.2 Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat**

Angell (dalam Ross 1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

##### **1. Usia**

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

## 2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah di dapur yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

## 3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

## 4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

## 5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini mengarah pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data, yang digunakan dalam pengelolaan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu dalam proses penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam tabel kerangka berpikir dengan harapan hasil penelitian tersaji secara akurat dan mudah untuk dipahami. Hal ini dapat dilihat dari tabel penelitian terdahulu di bawah ini:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hendra Wijayanto, Analisis implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi kota Surakarta, 2014.	deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa belum optimalnya implementasi perlindungan sosial lanjut usia oleh dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi kota Surakarta belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari analisis terhadap masing-masing indikator-indikator implementasi perlindungan sosial lansia yaitu karakteristik dari masalah ( <i>Trackability of the problem</i> ), karakteristik kebijakan ( <i>Ability of statute to structure implementation</i> ), dan lingkungan kebijakan ( <i>Non statutory variables affecting implementation</i> ), dimana masing-masing penilaian dengan berdasarkan 28 indikator-indikator tersebut bahwa hasilnya menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi perlindungan sosial lansia terbukti dengan masih banyak lansia terlantar kondisinya masih belum sejahtera.
2.	Sinta Yunistiana Dewi, Implementasi program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja oleh badan	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja informal yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja justru memahami program ini sebagai bentuk



No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan di kabupaten Tangerang, 2015.		tabungan dalam jaminan hari tua daripada meringankan beban akibat resiko kecelakaan kerja dan kematian yang berdampak pada penghasilannya, Peserta menganggap program jaminan hari tua justru lebih bermanfaat untuk jangka panjang.
3.	Putri Wijayanti, Implementasi kebijakan manfaat jaminan hari tua di provinsi Gorontalo, 2019.	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan manfaat jaminan hari tua di Gorontalo dipengaruhi oleh konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Salah satu konteksnya ialah adanya kebutuhan masyarakat yang dipandang belum menempatkan JHT sebagai hal penting dalam jaminan sosial bagi pekerja. Hal ini menekankan perlu BPJS ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan memperluas kemitraan untuk keberlangsungan JHT lebih baik.
4.	Delafina Diris Br Bangun, Implementasi program jaminan hari tua (JHT) di PT. Tirta Sibayakindo, 2019.	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi program jaminan hari tua di PT. Tirta Sibayakindo cukup baik, dapat dilihat dari pemahaman karyawan terhadap pelaksanaan program ini, meskipun program ini berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya program ini perlu dilakukan pengawasan.
5.	Natalia Niken Ekawati, Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PRODAMAS), 2016.	kuantitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa derajat partisipasi masyarakat dan faktor internal tidak berkontribusi dalam terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan tosaren, kota kediri. Adanya dominasi kaum pria, latar belakang Pendidikan, unsur keterpaksaan, pekerjaan, dan kurangnya sosialisasi program

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			menyebabkan derajat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

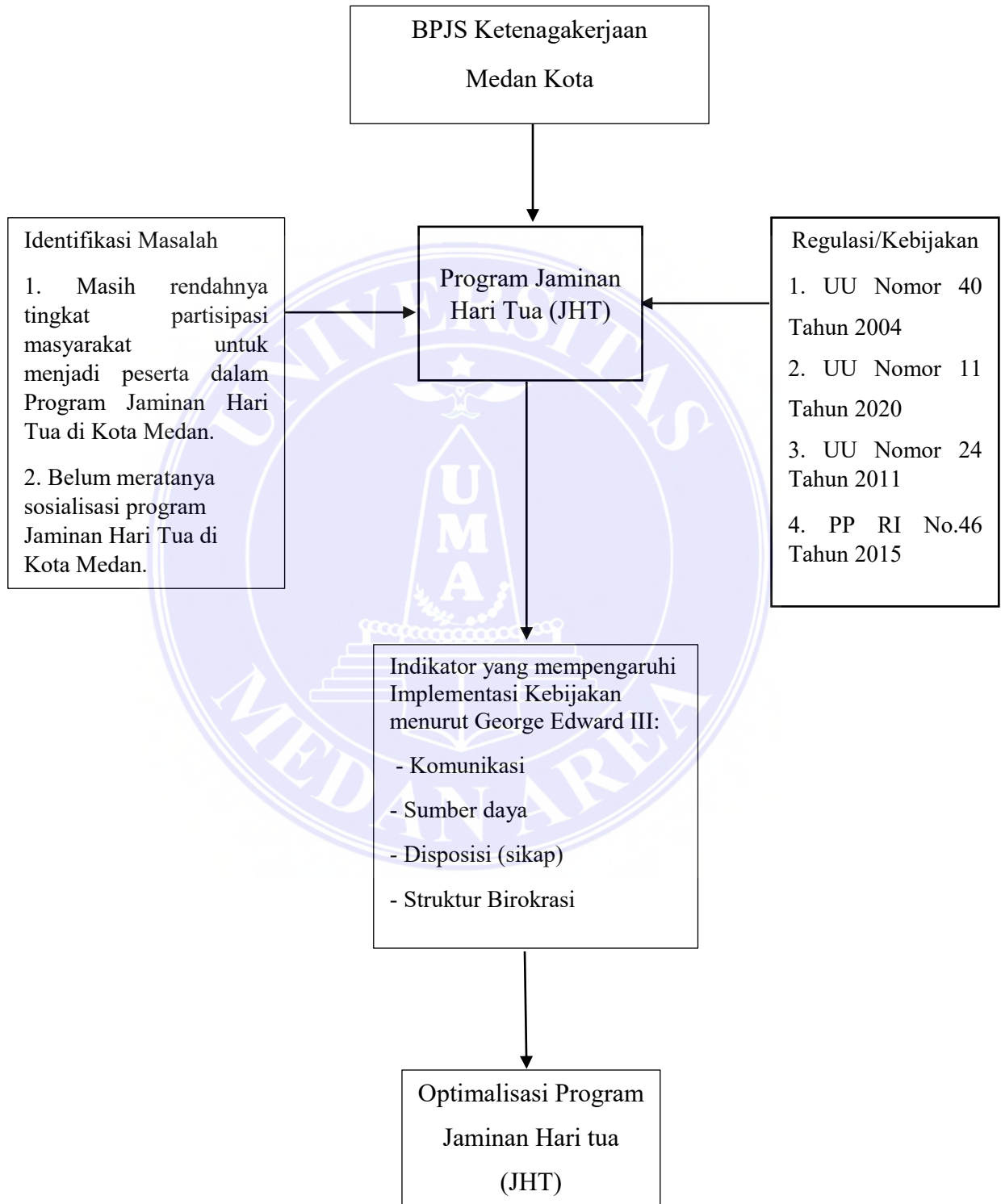
## 2.6 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2017:60) mencoba untuk menjelaskan kerangka berpikir adalah acuan konsep tual tentang bagaimana teori saling berkaitan dengan berbagai penyebab yang ditelusuri sebagai isu utama. Skema berpikir diciptakan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami, mendeskripsikan secara singkat prosedur pemecahan masalah yang diajukan oleh penulis. Protokol sederhana yang dikembangkan kemudian sepenuhnya dijelaskan sehubungan dengan mekanisme kerja dari faktor-faktor yang dihasilkan (Cholid Narbuko, 2010:140).

Penulis menguraikan kerangka berpikir merupakan konsep untuk melakukan penelitian, untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan di awal proses pelaksanaan hingga akhir, agar hasil dari penelitian tidak bertolak belakang dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir yang berkaitan dengan teori-teori yang berkesinambungan, agar dapat menjawab masalah-masalah yang ada di rumusan masalah penulis. Program Jaminan Hari Tua sebagai objek penelitian, dimana dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pada program jaminan hari tua oleh BPJS ketenagakerjaan di kota medan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap-sikap), struktur birokrasi sehingga

pada akhirnya tujuan yang diharapkan yaitu optimalisasi program Jaminan Hari Tua. Serta bagaimana faktor penghambat dan pendukung dari konsep tersebut.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dengan menguji hipotesis. Menurut Usman (2009), penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif bermaksud membuat penyandingan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*), bisa juga disebut dengan metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Sugiyono (2013:8).

#### **3.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder tersebut yaitu:

##### **1. Data primer**

Data primer yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian yang kesemuanya

berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi terhadap badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan Medan Kota.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan bagaimana Implementasi kebijakan program jaminan hari tua (JHT) oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan di kota medan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2013:224) mengatakan pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural alamiah), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai informan, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Menurut pendapat Sugiyono (2012:166), observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan



langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Secara sederhana observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung kelokasi penelitian. langkah yang pertama kali dilakukan dalam teknik observasi ini adalah datang ke lokasi penelitian yaitu di kantor Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan Medan Kota.

## 2. Wawancara

Menurut (Sugiyono 2013:137) Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Sedangkan menurut Sutrisno Hadid dalam Sugiyono (2013: 138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan kuisisioner adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud peneliti.

Penulis melakukan wawancara kepada: Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Medan Kota dan Kepala Bidang Umum dan SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan Medan Kota serta masyarakat Kota Medan selaku peserta maupun bukan peserta Program Jaminan Hari Tua (JHT).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah rekaman dan catatan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada responden. Alat yang digunakan yaitu handphone sebagai alat perekam suara dan juga untuk mengambil gambar.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2013:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2012:255) analisis kualitatif meliputi:

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya. Data yang akan dikumpulkan berupa pernyataan dari informan mengenai masalah yang terjadi, kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait.

##### 2. Reduksi Data

Reduksi merupakan tahap dari teknik analisis data yang melakukan penyederhanaan, penggolongan, dan menyaring data sehingga

menghasilkan informasi yang berguna, dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan ditariknya kesimpulan atau tindakan. Penyajian data juga merupakan penyederhanaan informasi agar dapat dengan mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan tertentu. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program jaminan hari tua oleh badan penyelenggara jaminan sosial kota medan.

### 3.5 Teknik Penentuan Informan

Mencari orang yang dapat dimintai informasi terkait dengan objek yang sedang diteliti maka dengan itu penulis menentukan menurut sugiyono (2018) pengumpulan data diawali dari mewawancari informasi awal atau informasi kunci. Dengan jenis pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, Adapun menurut Sugiyono (2012:54) teknik penentuan informan seperti ini disebut dengan istilah teknik *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan diatas. Dapat kita lihat sebuah persyaratan dalam menentukan informan, agar didapatnya informan yang tepat di dalam penelitian ini sehingga penelitian ini menjadi kredibel karena informan yang tepat. Menurut Ade heryana (2018) yang memberikan pengertian informan kunci dan informan tambahan yaitu Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan

kunci. Maka dari itu penulis menetapkan Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan Medan Kota sebagai informan kunci dan Kepala Bidang Umum dan SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Medan Kota sebagai informan utama, serta masyarakat kota medan peserta maupun bukan peserta program Jaminan Hari Tua sebagai Informan tambahan. Informan penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Uraian	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Medan Kota	1	Informan Kunci
2.	Kepala Bidang Umum dan SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Medan Kota	1	Informan Utama
3.	Masyarakat kota medan peserta maupun bukan peserta program Jaminan Hari Tua	4	Informan Tambahan

### 3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Instrumen penelitian digunakan oleh peneliti sebagai alat bantu dalam mencari data yang nyata dan terpercaya. Namun, peneliti juga didukung oleh alat bantu seperti panduan wawancara untuk memfasilitasi pelaksanaan yang bebas masalah. Dalam persiapan wawancara, peneliti melakukan hal berikut:

- a. Menetapkan informan untuk di wawancara.
- b. Siapkan topik masalah yang akan di bahas.
- c. Buka/mulai wawancara.
- d. Melakukan wawancara.
- e. Konfirmasi intisari percakapan lalu akhiri.
- f. Catat wawancara ke dalam buku catatan lapangan.
- g. Menentukan hasil wawancara lebih lanjut yg diperoleh peneliti.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, kamera, alat perekam, catatan lapangan, dan panduan/pedoman wawancara.

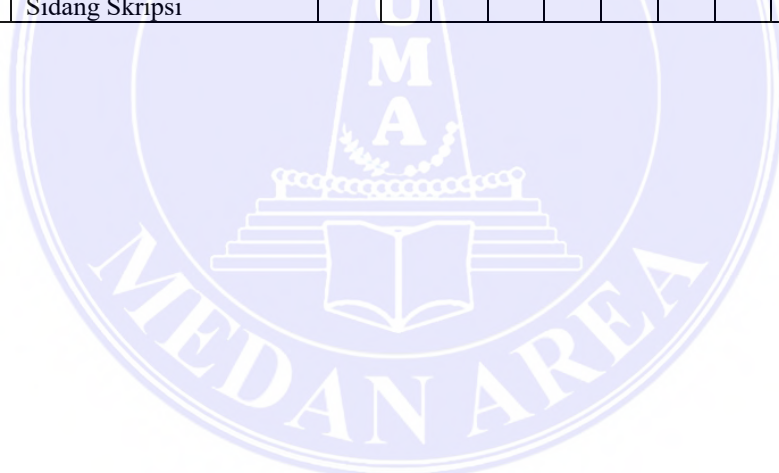
### 3.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian di kantor Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan Medan Kota.



**Tabel 3.2**  
**Jadwal Penyelesaian Skripsi**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		Okt 22	Nov 22	Des 22	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	Mei 23	Jun 23	Jul 23	Agus 23
1.	Pengajuan Judul	■										
2.	Observasi Awal											
3.	Penyusunan Proposal											
4.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal											
5.	Seminar Proposal		■									
6.	Revisi Proposal			■								
7.	Observasi Lapangan dan Wawancara				■							
8.	Penyusunan Bab IV – V				■							
9.	Seminar Hasil						■					
10.	Bimbingan Dan Perbaikan							■	■	■		
11.	Sidang Skripsi											■



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua di Kota Medan sudah berjalan dan masih berproses, tetapi belum optimal. hal tersebut dinilai dari 2 indikator Implementasi Kebijakan yang masih terkendala yaitu Indikator Komunikasi dan Indikator Sumber Daya, proses komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota Medan masih belum merata khususnya untuk kepesertaan pada sektor informal. Kemudian kendala masih ditemukan dari Indikator sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana yaitu meja pelayanan yang masih dirasakan kurang oleh peserta sehingga mengakibatkan antrian panjang untuk mendapatkan pelayanan sehingga berujung pada lama nya waktu menunggu antrian. Sedangkan dari Indikator Disposisi, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua di Kota Medan dinilai sudah baik. Dan dari Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa Struktur Birokrasi pada BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan datang dari Pemerintah Sumut berupa bantuan iuran sebesar 3 bulan yaitu PBI (penerima bantuan iuran) sedangkan faktor penghambatnya adalah Persepsi Masyarakat yang sudah mengambil dana dari Program Jaminan Hari Tua sebelum dirinya memasuki hari tua (dimana keadaan sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja) sehingga Program yang telah di skema kan oleh Negara ini tidak tepat sasaran.

## 5.2 SARAN

BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, disarankan untuk:

1. Melakukan pemerataan Sosialisasi mengenai Program-program serta manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ke semua lapisan masyarakat, agar semua masyarakat Kota Medan terlindungi dari resiko sosial.
2. Koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana agar implementasi kebijakan program Jaminan Hari Tua berjalan dengan baik di Kota Medan.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasari dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan sehingga dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai Program Jaminan Hari Tua di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Achmadi & Cholid, Narbuko. (2010). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2001) Pemberdayaan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Conyers, Diana. (1991). Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: UGM Press.
- Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Husaini, Usman.2009. Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta: Bumi Aksara.
- Karmanis, M. S., Karjono, M. T., & Ibda, H. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Publik. CV. Pilar Nusantara.
- Karmanis, M. S., Karjono, M. T., & Ibda, H. (2020). *Studi Analisis Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Koenjoroningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia. 1993
- Lalu Husni. 2012. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Mardikantoro. 2003. Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: UGM Press.
- Mikkelsen, Britha. 2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pengembangan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). Community Organization: theory, principles, and practice. Second edition. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Sastropetro. (1998). Partisipasi, Komunikasi Dan Persuasi Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni
- Sembiring, W.M. (2014). Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Sosial UMA).
- Suyahman (2021). Pengembangan bahar ajar PPKn di SD Jawa tengah, lakeisha.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1. Bandung: Al-Fabeta. 2005
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno Budi, *Teori Dan proses Kebijakan Publik, Media press*, Yogyakarta, 2012.
- Wojowasito dan Poerwadarminta, W.J.S. 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia.
- Blog Resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua dalam <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>.
- UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional.
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan.
- UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
- PP RI No.46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua



**LAMPIRAN 1  
PEDOMAN OBSERVASI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA  
(JHT) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
(BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi:  
Lokasi Penelitian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Wilayah Sumbagut.
2. Fasilitas, sarana dan prasarana:  
Fasilitas, sarana dan prasarana di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Wilayah Sumbagut yaitu ruang tunggu peserta, mushola, tempat parkir kendaraan, toilet.
3. Pelaksanaan kegiatan/ program:  
Pelaksanaan kegiatan/ program di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Wilayah Sumbagut.
4. Respon/ sikap:  
Respon/ sikap pegawai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Wilayah sumbagut ramah dan santun serta membantu mencari data apa yang diperlukan peneliti.

Instansi : BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota  
 Nama Program : Jaminan Hari Tua  
 Lokasi : Jalan Kapten Pattimura No.334 kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara  
 Tanggal : 29 Desember 2022

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti/ Indikator
1	Pelayanan Instansi	√		Dilihat saat observasi turun lapangan langsung
2	Stuktur Organisasi - Tupoksi	√		Dilihat saat observasi turun lapangan langsung
3	Sikap Pegawai	√		Ramah serta melayani dengan baik
4	Website Instansi	√		<a href="https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id">https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id</a>
5	Sarana dan Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Mushola d. Parkir e. Toilet	√		Dilihat saat observasi turun lapangan langsung

LAMPIRAN 2  
PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA  
(JHT) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)  
KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN**

**Kepala Bidang Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  
Ketenagakerjaan Medan Kota**

Kelengkapan, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi sangat diharapkan dalam proposal penelitian ini, karena itu peneliti hanya mengajukan garis besar rencana wawancara yang akan diperdalam saat melakukan wawancara dengan informan.

A. Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Jaminan Hari Tua Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kota Medan.

B. Pertanyaan panduan :

a. Identitas diri

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1) Nama                | : dr. Anita Fitriana   |
| 2) Jabatan             | : Kabid Pelayanan      |
| 3) Agama               | : Islam                |
| 4) Jenis kelamin       | : Perempuan            |
| 5) Pekerjaan           | : BPJS Ketenagakerjaan |
| 6) Alamat              | : Medan                |
| 7) Pendidikan terakhir | : Strata-1             |

b. Pertanyaan penelitian dengan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III :

**Komunikasi**

- 1) Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan mengenai program jaminan hari tua kepada Masyarakat di Kota Medan ?
- 2) Seperti apa komunikasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kota Medan?
- 3) Apakah ada kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah dalam penyampaian Program JHT ?

**Sumber Daya**

- 4) Bagaimana sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana di kantor BPJS ketenagakerjaan medan kota terhadap pelaksanaan program jaminan hari tua ?

- 5) Apakah cukup SDM yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota untuk menyelenggarakan program JHT ?

#### **Disposisi (Sikap-Sikap)**

- 6) Bagaimana sikap aparatur/pegawai BPJS ketenagakerjaan Medan Kota kepada masyarakat yang berkaitan dengan program jaminan hari tua ?
- 7) Seperti apa karakter para pegawai BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota kepada Masyarakat di Kota Medan sebagai pelayanan publik ?

#### **Struktur Birokrasi**

- 8) Bagaimana struktur birokrasi yang ada di BPJS ketenagakerjaan Medan Kota ?
- 9) Seperti apa pemisahan tugas pokok dan fungsi pada struktur birokrasi yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota ?

#### **Rumusan Masalah**

- 10) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pada program jaminan hari tua?
- 11) Apa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pada program jaminan hari tua ?

### **Kepala bidang Umum dan SDM Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Medan Kota**

#### **A. Pertanyaan panduan**

##### **a) Identitas diri**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1) Nama                | : Hadi Kurniawan       |
| 2) Jabatan             | : Kabid Umum dan SDM   |
| 3) Agama               | : Islam                |
| 4) Jenis kelamin       | : Laki-Laki            |
| 5) Pekerjaan           | : BPJS Ketenagakerjaan |
| 6) Alamat              | : Medan                |
| 7) Pendidikan terakhir | : Strata-1             |

- b) Pertanyaan penelitian dengan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III :

### **Komunikasi**

- 1) Apakah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota sudah melakukan komunikasi kepada Masyarakat di Kota Medan mengenai program jaminan hari tua ?
- 2) Dalam bentuk apa komunikasi yang dilakukan ?
- 3) Dalam penyampaian program JHT apakah terdapat hambatan?

### **Sumber Daya**

- 4) Apakah BPJS Ketenagakerjaan memiliki fasilitas sarana dan prsarana yang mendukung dalam melaksanakan Program JHT ?
- 5) Apakah BPJS Ketenagakerjaan memiliki SDM yang cukup dalam melaksanakan Program JHT ?

### **Disposisi (Sikap-Sikap)**

- 6) Bagaimana sikap aparat BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan Program JHT ?
- 7) Bagaimana Komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan program JHT ?

### **Struktur Birokrasi**

- 8) Bagaimana struktur organisasi yang ada di BPJS ketenagakerjaan Medan Kota?
- 9) Bagaimana dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab antar bagian?
- 10) Bagaimana penerapan SOP yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota ?

### **Rumusan Masalah**

- 11) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pada program jaminan hari tua?

12) Apa yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pada program jaminan hari tua ?

### **Masyarakat Kota Medan peserta program Jaminan Hari Tua**

#### A. Pertanyaan panduan

##### a) Identitas diri

- 1) Nama : Wilson Sitompul
- 2) Agama : Kristen
- 3) Jenis kelamin : Laki-Laki
- 4) Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Swasta
- 5) Alamat : Medan
- 6) Pendidikan terakhir : SMA

b) Pertanyaan penelitian dengan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III :

#### **Komunikasi**

- 1) Apakah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota melakukan komunikasi mengenai program jaminan hari tua kepada Masyarakat di Kota Medan ?

#### **Sumber Daya**

- 2) Bagaimana Fasilitas sarana dan prasaran yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota ?

#### **Disposisi (Sikap-Sikap)**

- 3) Bagaimana sikap aparatur/pegawai BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam masyarakat sebagai salah satu pelayanan publik ?

#### **Struktur Birokrasi**

- 4) Bagaimana pembagian tugas yang ada di BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam melayani masyarakat ?



## **Masyarakat Kota Medan peserta program Jaminan Hari Tua**

### **A. Pertanyaan panduan**

#### **a) Identitas diri**

- 1) Nama : Sahrul
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin : Laki-Laki
- 4) Pekerjaan : Pegawai Bank Sumut
- 5) Alamat : Medan
- 6) Pendidikan terakhir : Strata-1

#### **b) Pertanyaan penelitian dengan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III :**

##### **Komunikasi**

- 1) Apakah BPJS Ketenagakerjaan melakukan komunikasi mengenai program jaminan hari tua kepada Masyarakat di Kota Medan ?

##### **Sumber Daya**

- 2) Bagaimana Fasilitas sarana dan prasaran yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota?

##### **Disposisi (Sikap-Sikap)**

- 3) Bagaimana sikap aparatur/pegawai BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam masyarakat sebagai salah satu pelayanan publik ?

##### **Struktur Birokrasi**

- 4) Bagaimana pembagian tugas yang ada di BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam melayani masyarakat ?

## **Masyarakat Kota Medan bukan peserta program Jaminan Hari Tua**

### A. Pertanyaan panduan

#### a) Identitas diri

- 1) Nama : Masrita
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin : Perempuan
- 4) Pekerjaan : Pengusaha
- 5) Alamat : Medan
- 6) Pendidikan terakhir : SMA

#### b) Pertanyaan penelitian dengan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III :

##### **Komunikasi**

- 1). Apakah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota melakukan komunikasi mengenai program jaminan hari tua kepada masyarakat ?

##### **Sumber Daya**

- 2). Bagaimana Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota?

##### **Disposisi (Sikap-Sikap)**

- 3). Bagaimana sikap aparat/pegawai BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam masyarakat sebagai salah satu pelayanan publik ?

##### **Struktur Birokrasi**

- 4). Bagaimana pembagian tugas yang ada di BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam melayani masyarakat ?

## Masyarakat Kota Medan bukan peserta program Jaminan Hari Tua

### A. Pertanyaan panduan

#### a) Identitas diri

- 1) Nama : Sandi Akbar
- 2) Agama : Islam
- 3) Jenis kelamin : Laki-Laki
- 4) Pekerjaan : Pedagang
- 5) Alamat : Medan
- 6) Pendidikan terakhir : SMA

#### b) Pertanyaan penelitian dengan 4 indikator implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edward III :

##### **Komunikasi**

- 1). Apakah BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota melakukan komunikasi mengenai program jaminan hari tua kepada masyarakat ?

##### **Sumber Daya**

- 2). Bagaimana Fasilitas sarana dan prasaran yang ada di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota?

##### **Disposisi (Sikap-Sikap)**

- 3). Bagaimana sikap aparat/pegawai BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam masyarakat sebagai salah satu pelayanan publik ?

##### **Struktur Birokrasi**

- 4). Bagaimana pembagian tugas yang ada di BPJS ketenagakerjaan Medan Kota dalam melayani masyarakat ?

### LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN

#### WAWANCARA BERSAMA KABID PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN MEDAN KOTA

**Ibu dr Anita Fitriana**



#### WAWANCARA BERSAMA KABID UMUM DAN SDM BPJS KETENAGAKERJAAN MEDAN KOTA

**Bapak Hadi Kurniawan**





### WAWANCARA BERSAMA DENGAN MASYARAKAT PESERTA PROGRAM JHT Bapak Wilson Sitompul dan Bapak Sahrul



### WAWANCARA BERSAMA DENGAN MASYARAKAT BUKAN PESERTA PROGRAM JHT Ibu Masrita dan Saudara Sandi Akbar





## LAMPIRAN 4 SURAT RISET LAPANGAN

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus I : Jalan Kotan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360166, 7366676, 7364348 ☎ (061) 7369012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ.medanarea@uma.ac.id](mailto:univ.medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 137 / FIS.1/01.10/XII/2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

20 Desember 2022

Yth,  
**Ka. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Medan  
Di Tempat**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Ferdy Syahputra  
N P M : 198510058  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Medan, dengan judul Skripsi "**Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Medan**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
**Dr. Effiati Julianna Hasibuan, M.Si**

CC : File,-

## LAMPIRAN 5 SURAT PERSETUJUAN PENGAMBILAN DATA/RISET

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
Janggi kami **bpamsostek**

Nomor B/RIH/012023 17 Januari 2023

Yth  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area  
di  
Jl. Setia Budi No. 1  
Medan

Perihal **Persetujuan Pengambilan Data/Riset**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area nomor: 1351/FIS/1/01.10/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, perihal Pengambilan Data/Riset, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya permohonan yang diajukan kepada kami untuk pengambilan data/riset dapat disetujui.
2. Adapun mahasiswa/i yang Kami setuju untuk pengambilan data dimaksud adalah:

Nomor	Nama	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
1	Ferdy Syahputra	198510058	Ilmu Pemerintahan	Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Medan

3. Selanjutnya, diminta kepada mahasiswa/i yang melaksanakan penelitian di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan agar berpakaian rapi, sopan dan mengikuti peraturan yang berlaku di instansi kami dan setiap data yang diperoleh selama penelitian agar disampaikan terlebih dahulu kepada kami sebelum dilakukan publikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.


 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
MEDAN KOTA

Sud Rahmad  
Kepala

HA/EL/HL/03.00

BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jl. Setia Budi No. 1, Medan, Sumatera Utara, 20131  
Telp: (061) 4100041 Fax: (061) 4100022, www.bpjskkt.medan.go.id

## LAMPIRAN 6 SURAT SELESAI PENGAMBILAN DATA/RISET

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
panggil kami **bpjamsostek**

Nomor **B/1340 /022023** Februari 2023

Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area  
di  
Jl. Seiabudi No. 1  
Medan

Perihal **Selesai Pengambilan Data/Riset**

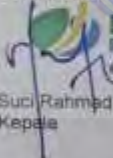
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area nomor 1351/FIS-1/01.10/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, perihal Pengambilan Data/Riset, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pengambilan data/riset sudah selesai dilaksanakan melalui metode wawancara kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Umum & SDM Kantor Cabang Medan Kota BPJS Ketenagakerjaan
2. Adapun mahasiswa/ yang telah selesai melaksanakan pengambilan data dimaksud adalah:

Nomor	Nama	NIM	Program Studi	Judul Penelitian
1	Ferdy Syahputra	196510058	Ilmu Pemerintahan	Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Medan
3. Selanjutnya, diminta kepada mahasiswa/ yang telah selesai melakukan pengambilan data untuk terlebih dahulu membenarkan kepada kami hasil data yang telah diambil sebelum dilakukan publikasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih

  
**BPJS**  
Ketenagakerjaan  
MEDAN KOTA  
Suci Rahmed  
Kepala

HA/EL/HL 03 00